

**THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION
ON TAX AVOIDANCE IN INDONESIA SHARIA BANKING
PERIODE 2013 - 2017**

**PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2013 - 2017**

M. Indra Gunawan¹⁾, H. Mukhzarudfa²⁾, Ilham Wahyudi³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019*

²⁾*Dosen Pembimbing*

ABSTRACT

The financial and banking industry provides the largest tax contribution in Indonesia as well as the industry which has the most tax evasion. This study aims to examine whether good corporate governance as proxied by the effectiveness of the board of commissioners and audit committees, audit quality and institutional ownership is able to minimize the avoidance of banking taxes, especially sharia banking in Indonesia, which not only applies good corporate governance principles but also applies sharia principles. This research will use quantitative research methods with multiple linear regression analysis models. Researchers observed 35 samples of Islamic banking companies in Indonesia in 2013-2017. The results of the research prove that the effectiveness of the board of commissioners, the effectiveness of the audit committee and institutional ownership have a great influence on tax avoidance of Islamic banking in Indonesia, while the quality of auditors has no effect in making policies that are related to tax avoidance.

Keywords: *Indonesian Islamic banking, the effectiveness of the board of commissioners, the effectiveness of the audit committee, audit quality, institutional ownership, tax avoidance*

ABSTRAK

Industri keuangan dan perbankan memberikan sumbangan pajak terbesar di Indonesia sekaligus industri yang paling banyak melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan menguji apakah *good corporate governance* yang diprosikan oleh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, kualitas audit serta kepemilikan institusional mampu meminimalkan penghindaran pajak perbankan terutama perbankan syariah di Indonesia yang bukan hanya menerapkan prinsip GCG dengan baik namun juga menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda. Peneliti mengobservasi sebanyak 35 sampel perusahaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak perbankan syariah di Indonesia, sedangkan kualitas auditor tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak.

Kata kunci: Perbankan syariah Indonesia, efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, penghindaran pajak

1. PENDAHULUAN

Laporan Tahunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017 disebutkan bahwa terdapat tiga sektor yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak. Sektor-sektor tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan dan jasa keuangan. Penerimaan pajak yang terealisasi sebesar Rp 1.151 triliun, yang disumbang dari beberapa industri seperti, industri pengolahan menyumbang sekitar 31,8 persen, perdagangan 19,3 persen dan jasa keuangan 14,0 persen.

Industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan menarik untuk dibahas sejak berkembangnya industri keuangan baru yaitu perbankan syariah. Industri ini memiliki karakteristik dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan tingkat suku bunga, serta didasari oleh prinsip keadilan (Benhayoun dkk, 2014). Beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang membedakan antara transaksi di industri keuangan syariah dengan transaksi industri konvensional. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia didorong oleh latar belakang negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan pangsa pasar yang sangat potensial. Sehingga, potensi penerimaan pajak dari sektor perbankan khususnya perbankan syariah dapat meningkat.

Permasalahan yang terjadi adalah adanya fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada sektor perbankan di Indonesia. Menurut Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa (2014) bahwa bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor yang melakukan penghindaran pajak cukup besar. Modus yang sering digunakan adalah penghindaran pajak dengan dengan metode rencana perpajakan agresif (*agresive tax planning*). Para pengelola bank dan lembaga keuangan melakukan penghindaran pajak dengan cara memasukan belanja yang tidak masuk akal, sehingga seakan perusahaan mengalami kerugian. Bahkan, penghindaran pajak yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.10-12 triliun dalam setahun. Misalnya, Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Central Asia (BCA). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bank BCA dilakukan dengan memanfaatkan celah aturan pajak melalui belanja di luar kewajiban, menaikkan gaji dan tunjangan karyawan serta menyuap oknum pejabat. (Kompas, 2014).

Fenomena adanya *tax avoidance* di buktikan oleh Vania, Nugraha dan Nugroho (2018) membuktikan bahwa bank syariah di Indonesia dan Malaysia melakukan penghindaran pajak dengan melakukan manajemen laba. Salah satu motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah *Taxation Motivation* (motivasi perpajakan). Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan, hingga

pada akhirnya besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih kecil.

Salah satu penyebab perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Penerapan *good corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh bank. Suatu bank tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba yang besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Hal inilah yang menyebabkan suatu bank syariah akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan penghindaran pajak (Bernard, 2011).

Good Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan syariah bukan hanya dilandaskan oleh lima prinsip dasar yaitu transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggung jawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), kewajaran (*Fairness*), tetapi di tambah dengan adanya prinsip syariah yang mendukung seperti prinsip kejujuran (Shidiq), edukasi kepada masyarakat (Tabligh), kepercayaan (Amanah), dan pengelolaan secara profesional (Fathanah).

Kegiatan operasional perbankan syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seharusnya mampu menjadikan bank syariah tampil sebagai yang terdepan dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG). Pada Tahun 2017 majalah *economic review* menyelenggarakan *Indonesia Good Corporate Governance Award* (IGCGA). Hanya terdapat 4 bank syariah dari 9 bank konvensional yang sudah *go public* dan bank syariah masih menempati posisi bawah penerima penghargaan IGCA dibandingkan dengan bank konvensional yang telah *go public*. Kegiatan operasional perbankan syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seharusnya mampu menjadikan bank syariah tampil sebagai yang terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG).

Penelitian terhadap hubungan langsung antara *good corporate governance* dengan *tax avoidance* masih jarang dijumpai di Indonesia dan masih bersifat inkonsisten. Misalnya, seperti Ni Nyoman Kristiana Dewi (2014), Rachmitsari (2015) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Vivi Andeyani Tandean (2016) menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

tax avoidance membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* yang diprosikan oleh efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang tidak konsisten salah satunya disebabkan oleh adanya keterbatasan data mengenai pajak badan usaha yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan khususnya laporan arus kas belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena laporan arus kas untuk pembayaran pajak bercampur dengan pajak-pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sanksi pajak (Annisa, 2012).

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan memberikan kontribusi pada tiga poin utama, yaitu: (a) hasil penelitian ini akan mengisi gap inkonsistensi yang terjadi antara beberapa penelitian sebelumnya, (b) mampu memberikan kontribusi bagi investor dalam menentukan pilihan investasi, (c) kontribusi bagi pemerintah dalam menentukan peraturan perpajakan untuk meminimalkan terjadinya penghindaran pajak.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajer. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Dengan kata lain prinsipal yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan.

Agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, selain itu agen juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan atau tugas yang telah dibebankan kepada agen (Rachmithasari, 2015).

Corporate governance merupakan konsep yang didasari pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu *corporate governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

2.2. *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory menurut Triyuwono (2015) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan.

Shariah Enterprise Theory menempatkan Allah sebagai pemberi amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Nilai spiritual yang melekat dalam *Shariah Enterprise Theory* antara lain *abduh, mardhatillah, dan rahmatan lil alamin* (Triyuwono, 2015).

Stakeholder kedua dari *Shariah Enterprise Theory* adalah manusia, yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*), karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. *Indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Triyuwono, 2015). *Direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atau minimal tidak menerima kerugian dari keberadaan suatu perusahaan melalui distribusi kesejahteraan dari pembayaran pajak yang dilakukan.

2.3. Pengaruh Dewan komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori keagenan. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan principal dan manajer di dalam perusahaan. KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance. Sehingga menjadi tugas utama bagi dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dengan begitu adanya dewan komisaris yang efektif dapat mencegah *tax avoidance*.

Penelitian Dewi dan Jati (2014) serta penelitian Prakosa (2014), keduanya menunjukkan bahwa struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sudah menjadi tugas bagi dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dengan begitu adanya dewan komisaris efektif dalam mencegah *tax avoidance*.

H1: Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance disebutkan anggota komite audit paling setidaknya harus terdiri dari (a) Seorang komisaris independen; (b) Seorang pihak independen yang memiliki kemampuan dibidang akuntansi keuangan; (c) Seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah.

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Muhammad Oktofian (2014) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan yang menguatkan pengaruh adanya komite audit terhadap *tax avoidance* di perusahaan. Yang pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif dan berlaku sebaliknya. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

Fadhilah (2014); Maharani dan Suardana (2014), Diantari dan Ulupui (2016); Dewi (2013), ketiga penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa komite audit dalam fungsinya sangat efektif untuk mencegah *tax avoidance*. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan

pengawasan terhadap kinerja perusahaan, maka dengan adanya komite audit di suatu perusahaan dapat mencegah perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang berkompoten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode pemilihan sampel yang benar, dan lain sebagainya. Sebaliknya auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor akan melaporkan adanya pelanggaran atau independensi auditor tergantung pada tingkat kompetensi mereka.

Kualitas audit diukur dengan spesialisasi Auditor pada yang melakukan audit pada suatu sektor usaha tertentu, jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang spesialis di bidangnya, maka akan lebih kompeten dan independen untuk menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran pada penyusunan Laporan Keuangan.

Annisa (2011) membuktikan bahwa kualitas audit mampu mencegah *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2013) yang membuktikan bahwa semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan, maka kecenderungan dalam manipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan, hingga pada akhirnya mampu meningkatkan transparansi yang merupakan salah satu konsep *good corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Kualitas Audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

2.6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi (Fadhilah, 2014). Shleifer dan Vishny (1997) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik.

Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam

meminimalkan pelaporan perpajakannya. Utami (2013) dan Fadhilah (2014) mendukungnya, dengan membuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya tax avoidance.

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2013-2017. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari *Annual Report* (laporan tahunan) dan laporan *good corporate governance* yang dipublikasikan masing-masing bank umum syariah selama tahun penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 35 sampel perusahaan perbankan syariah yang di observasi dalam penelitian ini.

3.1. Pengukuran Variabel

a. Efektivitas Dewan Komisaris

Dewan komisaris dihitung menggunakan skor yang dihitung berdasarkan 17 kriteria penilaian yang diperoleh dari daftar pertanyaan (checklist) oleh Fathoni (2013) yang disusun berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, size (jumlah anggota), dan kompetensi. Hasil penilaian akan dibagi menjadi 3 kategori yaitu good dengan skor 3, fair dengan skor 2, dan poor atau no information dengan skor 1. Untuk menguji keandalan dari pertanyaan, dilakukan pengujian *cronbach alpha* atas hasil yang diperoleh.

b. Efektivitas Komite Audit

Skor efektivitas komite audit dihitung berdasarkan atas 11 kriteria penilaian yang diperoleh dari daftar pertanyaan (checklist) yang dilakukan oleh penelitian terdahulu (Fathoni, 2013). Kriteria penilaian tersebut disusun berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh komite audit, yaitu aktivitas, size (jumlah anggota), dan kompetensi. Dalam penelitian Fathoni (2013) hasil penilaian akan dibagi menjadi 3 kategori yaitu good, fair, dan poor. Jika setiap kategori terpenuhi maka perusahaan akan mendapat penilaian good, namun jika komite audit tidak melakukan tugasnya atau tidak terapat informasi maka perusahaan akan mendapatkan penilaian poor. Untuk menguji keandalan dari pertanyaan penelitian dilakukan pengujian *cronbach alpha* atas hasil yang diperoleh.

c. Kualitas Audit

Kualitas audit diukur dengan menggunakan variable *dummy* yang bernilai 1 apabila audit laporan

keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi kriteria sebagai auditor spesialisasi industry perbankan syariah, dan bernilai 0 untuk sebaliknya.

d. Kepemilikan institusional

Penggunaan variabel ini pernah didasari oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), Dewi dan Jati (2014), Khoirunnisa (2015), Oktofian (2015), Diantari dan Ulupui (2016), Ariawan dan Setiawan (2017), yaitu membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan total saham yang beredar dan dikalikan dengan seratus persen.

e. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dengan rumus (Hanlon & Heitzman, 2010).

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{pre - tax income}}$$

Keterangan:

CETR: *Cash Effective Tax Rate*.

Cash Tax Paid: Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre - tax income: Laba sebelum pajak

3.2. Model Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda serta melakukan beberapa pengujian asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian menguji model penelitian dengan menggunakan Uji *t statistic*, Uji F dan uji koefisien determinasi.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Persamaan regresi adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

X₁ = Efektivitas Dewan Komisaris

X₂ = Efektivitas Komite Audit

X₃ = Kualitas Audit

X₄ = Kepemilikan Institusional

E = error term

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Nilai r-hasil pada variabel efektivitas dewan komisaris dan variabel efektivitas komite audit (nilai di kolom Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dibandingkan r-tabel, atau r-hasil > r-tabel (0,334). Maka, pertanyaan dalam penelitian pada kedua variabel tersebut telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (valid). Kemudian, hasil pengujian

terhadap reliabilitas kuesioner pada variabel efektivitas dewan komisaris nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,891 dan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel efektivitas komite audit lebih besar dari 0,60 yaitu 0,767. Dengan demikian, kuesioner yang ditanyakan pada kedua variabel tersebut terbukti valid.

4.2. Statistik Deskriptif

Secara total keseluruhan nilai rata-rata efektivitas dewan komisaris adalah 47,5143 berada sedikit dibawah total skor nilai *good* yang dapat diperoleh yaitu sebesar 51 (17 pertanyaan dikali 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan dewan komisaris pada perusahaan perbankan syariah yang menjadi observasi penelitian memiliki efektivitas yang baik.

Nilai rata-rata untuk variabel efektivitas komite audit, secara statistik dinilai baik karena berada sedikit dibawah nilai *good* untuk skor komite audit, yaitu 32 (11 pertanyaan dikalikan nilai 3). Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa komite audit perbankan syariah pada observasi tahun penelitian sudah sangat efektif dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan. Variabel Kualitas Audit (X_3) mempunyai nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,51, serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,507.

Kepemilikan Institusional (X_4) mempunyai nilai minimum sebesar 88,81, nilai maksimum sebesar 100, nilai rata-rata (mean) sebesar 98,10, serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,918.

Tax Avoidance (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 0,2260, nilai maksimum sebesar 0,5667, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2876, serta memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,0651.

4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Penelitian ini telah memenuhi syarat asumsi klasikal, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Nilai probabilitas > taraf signifikansi yang ditetapkan ($\alpha=0,05$) yaitu 0,909 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual data sampel berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Keseluruhan variabel independen, angka toleransi berada di sekitar > 1 (VIF < 10). Jika nilai toleransi (0,977; 0,861; 0,977; 0,875) > 0,10 dan VIF (1,023; 1,162; 1,023; 1,143) < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada penelitian.

c. Uji Autokorelasi

Diperoleh nilai *Dw* sebesar 2,158, maka $1,7259 < 2,158 < 2,2741$, artinya $Du < Dw < (4-Du)$. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ini telah memenuhi asumsi autokorelasi.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan (R Square) adalah 54,2%. Hal ini berarti bahwa Efektivitas Dewan Komisaris (X_1), Efektivitas Komite Audit (X_2), Kualitas Audit (X_3), dan Kepemilikan Institusi (X_4) mampu menjelaskan 54,2 variasi nilai *Tax Avoidance* (Y), sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

b. Hasil Pengujian F

Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} = 8,886$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dimana $\alpha < 0,05$. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Efektivitas Dewan Komisaris (X_1), Efektivitas Komite Audit (X_2), Kualitas Audit (X_3), dan Kepemilikan Institusi (X_4) memiliki pengaruh terhadap nilai *Tax Avoidance* (Y).

c. Hasil Pengujian t statistik

Persamaan yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,944 - 0,012X_1 - 0,015X_2 + 0,009X_3 - 0,006X_4 + e$$

- 1) Nilai 1,944 adalah nilai konstanta (a), yang menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel Efektivitas Dewan Komisaris (X_1), Efektivitas Komite Audit (X_2), Kualitas Audit (X_3), dan Kepemilikan Institusi (X_4), maka nilai *Tax Avoidance* (Y) adalah 1,944.
- 2) Nilai -0,012 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap penambahan Efektivitas Dewan Komisaris (X_1), maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,012 den
- 3) gan asumsi variabel lainnya tetap.
- 4) Nilai -0,015 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap penambahan Efektivitas Komite Audit (X_2), maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,015 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 5) Nilai 0,009 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap penambahan Kualitas Audit (X_3), maka *Tax Avoidance* akan meningkat sebesar 0,009 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 6) Nilai -0,006 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa setiap penambahan praktik Kepemilikan Institusi (X_4), maka *Tax Avoidance* akan menurun sebesar 0,006 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

4.5. PEMBAHASAN

a. Efektivitas Dewan Komisaris dan Tax Avoidance

Hasil uji *t statistic* menunjukkan koefisien regresi memiliki nilai negatif sebesar 0,308 dan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$, hal ini berarti Efektivitas Dewan Komisaris (X_1) memiliki pengaruh

negatif terhadap nilai *Tax Avoidance* (Y). Hal ini membuktikan bahwa dewan komisaris di dalam perusahaan sudah bekerja secara independen yang artinya tidak dapat diintervensi oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan kebijakan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Titisari dan Mahanani (2017) yang membuktikan Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan karena komisaris independen yang besar di dalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktik *tax avoidance*. Kemungkinan peran komisaris independen dalam mekanisme corporate governance tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

b. Efektivitas Komite Audit dan Tax Avoidance

Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,381 dan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$, hal ini berarti Efektivitas Komite Audit (X_2) memiliki pengaruh negatif terhadap Manajemen Laba (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titisari dan Mahanani (2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komite audit mampu memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan menekan upaya manajemen perusahaan untuk memanipulasi laba dengan menghindari beban pajak. Peran komite audit dalam perusahaan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan hingga pada akhirnya dapat menekan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan meminimalkan beban pajak atau melakukan praktik *tax avoidance*.

c. Kualitas Audit dan Tax Avoidance

Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,073 dan nilai signifikansi sebesar $0,556 > 0,05$, hal ini berarti Kualitas Audit (X_3) tidak memiliki pengaruh terhadap nilai *Tax Avoidance* (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat mendorong atau membatasi terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan.

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak meskipun kualitas auditnya diukur dari auditor yang berasal dari KAP maupun non KAP. Dalam penelitian ini tampaknya kualitas auditor tidak berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang ada keterkaitannya dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanto (2017) yang menyatakan bahwa tipe auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

d. Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance

Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,386 dan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$, hal ini berarti

Kepemilikan Institusi (X_4) memiliki pengaruh negatif terhadap nilai *Tax Avoidance* (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan oleh institusi maka semakin rendah perilaku manajemen perusahaan dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim (2017). Keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan untuk menghindari adanya tindakan pajak agresif atau meminimalkan beban bajak untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham (*stake holder*) sehingga para pemilik institusional memiliki inisiatif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang tidak akan merugikan pemegang saham dengan tidak melakukan kecurangan pada beban pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Secara keseluruhan, sebagian besar proksi yang digunakan untuk mengukur GCG seperti efektivitas dewan komisaris dan komite audit serta kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perbankan syariah di Indonesia Tahun 2013-2017. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ketiga proksi tersebut mampu mencegah manajemen perusahaan melakukan manajemen laba dimana salah satu tujuan manajer melakukan manajemen laba adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) terutama pada perusahaan perbankan yang menyumbang pajak terbesar sekaligus penghindaran pajak (*tax avoidance*) terbesar di Indonesia. Sedangkan proksi lainnya dalam GCG yaitu kualitas audit, belum bisa membuktikan mampu meminimalkan tindakan *tax avoidance*. Meskipun perusahaan memiliki kualitas audit yang baik namun, nyatanya tidak bisa memengaruhi keputusan manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

5.2. Saran

Terdapat beberapa keterbatasan dan memungkinkan untuk penelitian selanjutnya melengkapi keterbatasan tersebut dengan saran sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan menggunakan objek lain selain perbankan syariah di Indonesia, misalnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perbankan konvensional.
2. Menambahkan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* di samping variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti *leverage*, *size firm*, dan akitivitas *corporate social responsibility*.
3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain dalam mencari

tindakan *tax avoidance*, misalnya pengukuran menggunakan *book tax differences* dan *discretionary permanent*.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. *Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8
- Akmal. 2006. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: Indeks.
- Amir Machmud dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta :Erlangga.
- Ariawan, R.A., & Setiawan, P.E. (2017). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Lverage terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntani, ISSN:2302-8556
- Benhayoun, Nesrin, Ikram Chairi, Amina El Gonnouni, dan Abdelouahid Lyhyaoui. 2014. *“Islamic Banking Challenges Lie in the Growth of Islamic Economy Despite of the Free Interest Loans Policy: Evidences From Support vector machine approach.” ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*
- Bernard, H. R. 2011. *Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Fifth Edition*. Altamira press, UK
- Cahyono, Andini, dan Raharjo. (2016). *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tindak Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013*. Journal of Accounting, Vol.2, No.2.
- Darussalam, 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, and Anti Avoidance Rule. Observasion & Research of Taxation*. www.ortax.org
- Desai, M.A. dan D. Dharmapala. 2006. *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*. Journal of Financial Economics
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
- Diantari, Putu Rista dan IGK Agung Ulupui. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.1.Juli (2016)
- Dyreg,Scott D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew.2010.*The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*.American Accounting Association.The Accounting Review Vol 85, No 4
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eksandy, A. (2017). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Competitive, Vol. 1, No.1.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei 2009 -2011)*. Jurnal universitas negeri padang. Volume 2, No 1.
- Fahriani, Melinda dan Maswar Patuh Priyadi. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol.5, No.7. ISSN: 2460-0585.
- Fathoni, A., & Hermawan, A. A. (2013). *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba untuk perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 dan 2011*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi Kedelapan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Goaied, Mohamed, dan Seifallah Sassi. 2010. *“Financial Development and Economic Growth in the MENA Region: What about Islamic Banking Development.” Institut des Hautes Etudes Commerciales, Carthage*
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. 2010. *A review of tax research*. Journal of Accounting and Economics
- Hermawan, A.A. (2009). *Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Kepemilikan oleh Keluarga dan Peran Monitoring Bank Terhadap Kandungan Informasi Laba*. Disertasi Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.
- Karim, Abdul. 2017. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan.

- Kementerian Keuangan. 2018. Informasi APBN 2018.
- Kesuma, Agus Iwan. 2016. Pengampunan pajak (Tax Amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak, *Journal Keuangan dan manajemen*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Indonesia.
- Kirchler, Erich. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate governance pada BUMN
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
- Mahanani, A., dan Titisari, K. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Sales Growth* dan CSR Terhadap Tax Avoidance. Seminar Nasional IENACO
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Andi Offset : Yogyakarta
- Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta
- Mcguire, Sean. T. 2012. *Tax Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference?. The Accounting Review, American Accounting Association Vol. 87, No.*
- Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih. 2012 "Pengaruh Corporate Governance Terhadap tax Avoidance" *Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol.8/No.2/Mei 2012*
- OECD Publication. 2004. Principles of Corporate Governance
- Oktofian, Muhammad.2015.Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2009-2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Owhoso, Vincent. E. 2012. *Error Detection by Industry-Specialized Teams during Sequential Audit Review. Journal of Accounting Research Vol. 40 No. 3 June 2002 Printed in U.S.A.*
- PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Pradana, A.B & Aridyanto M.D. 2017. Pengaruh Karakteristik Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Diponegoro Journal Of Accounting.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram
- Putranti, P. M., Jati, W., & Tambunan, M. R. 2015. Studi Penghindaran Pajak. Responsi. Bank Indonesia
- Rachmithasari, A.F. 2015. Pengaruh Return on Assets, Leverage. Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Palan, Ronen. 2008. *Tax havens and the commercialization of state sovereignty*. Cornell University Press. International Organization
- Sartori, N. 2010. Effect of Strategic Tax Behaviours on Corporate Governance. www.ssrn.com. Diakses tanggal 10 Nopember 2018.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishny. 1997. *A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance*.
- Sudarmayanti. 2007. "Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)". Bandung : CV Mandar Maju.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Manajemen Keuangan bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta : Balairung.
- Triuwono, Iwan. 2007. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Uadiale, O.M. 2010. *The impact of board structure on corporate financial performance in Nigeria. International Journal of Business and Management*
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Pramuka, Bambang Agus. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur). Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007
- Vania, Adela Sarah. 2018. *Does Earning Management Happen In Islamic Bank? (Indonesia And Malaysia Comparison). International Journal of Commerce and Finance, Vol. 4*
- Vivi Adeyani Tandean, Winnie, 2016. *The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013, Asian Journal of Accounting Research*

Widyastuti, Etty, 2004, "Konflik Kepentingan Kepemilikan Manajemen Pada Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan", Balance, Jakarta.

Wijayanti, Elvira Dian Restu.2011.Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan.Universitas Jember.

Zhou, J., and Elder, R. (2001). "Audit Firm Size, Industry Specialization and Earnings Management by Initial Public Offering Firms" SUNY at Binghamton working pape.